

# **EFEKTIVITAS PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR TANGGUH (PKPT) DI KABUPATEN PEKALONGAN**

Oleh

Munna Rafika R, Dra. Hesti Lestari, MS

**Departemen Administrasi Publik**  
**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro**  
Jl. Prof. H. Soedarto, SH Tembalang Semarang Kotak Pos 1269  
Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405  
Laman : <http://www.fisip.undip.ac.id> email [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)

## **ABSTRACT**

This research aims to analyze the effectiveness program execution by looking at the purpose of the has been reached Coastal Area development program Tough (PKPT) which was carried out in three villages namely, Api-api, Pecakaran and Mulyorejo. This research uses qualitative data collection techniques through in-depth interviews. In this research the theory used is the theory of public administration, public policy and effectiveness. This program PKPT is urgently needed by coastal communities in particular. Effectiveness can be felt in what has planned in accordance with the results obtained. The participation of coastal communities is indispensable in this program, because the society became the main actors in the implementation of activities. This research has concluded that the implementation of the Program of development of the coastal area is Tough in Pekalongan in particular with the aim to improve the preparedness of communities, improve the quality of the living environment in coastal areas, facilitate development activities the development of socio-economic facilities and infrastructure in coastal regions, develop institutional society as participatory by involving the role of women has not been effective in suspending and standaloned coastal communities. Recommendations for this Audit program, the Government is increasing the return of socialization to society not only to coastal communities (KMP), other recommendations the Government should review again the importance of this work PKPT program.

Key words: effectiveness, Program, Community participation

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh (PKPT) merupakan kegiatan yang menitikberatkan pada kelintangan kawasan pesisir, dimana partisipasi masyarakat pesisir sangat menentukan keberhasilan program ini. Kawasan pesisir memiliki beragam kerentanan meliputi ekonomi, sosial, lingkungan dan fisik. Masyarakat pesisir rentan secara ekonomi ditandai dengan tingginya tingkat kemiskinan masyarakat pesisir. Pengetahuan masyarakat pesisir tentang bencana dan ancaman perubahan iklim di wilayah pesisir masih rendah, demikian juga tingkat kesehatan masyarakat, serta tingkat kemandirian organisasi sosial.

Kawasan pesisir di Indonesia dihadapkan pada 4 (empat) persoalan pokok, yakni :

1. Tingginya tingkat kemiskinan masyarakat
2. Tingginya kerusakan sumberdaya pesisir

3. Rendahnya kemandirian organisasi sosial dan lunturnya nilai-nilai budaya lokal
4. Minim dan rendahnya kualitas infrastruktur dan kesehatan lingkungan permukiman.

Adanya permasalahan yang mengganggu masyarakat pesisir tersebut, maka Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada tahun 2012-2014 telah melaksanakan program Pengembangan Desa Pesisir Tangguh (PDPT). Berjalan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun tersebut, kegiatan PDPT terbukti telah meningkatkan ketangguhan desa pesisir. Kondisi ini berimplikasi PDPT berproses cepat menjadi program Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh (PKPT), dengan PKPT yang diharapkan mampu menjawab kendala sekaligus memanfaatkan potensi sumberdaya yang ada pada kawasan pesisir.

Pelaksanaan program Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh (PKPT) ini dilaksanakan

di 3 (tiga) desa yaitu, desa Api-api, desa Pecakaran dan desa Mulyorejo. Desa Api-api merupakan daerah rendah, sehingga dampak yang sering terjadi adalah banjir. Lokasi yang berdekatan dengan sungai, yang setiap hari meluap pada saat pasang sehingga menggenangi permukiman warga. Dari banjir yang terjadi banyak kerusakan yang ditimbulkan, diantaranya kumuhnya lokasi permukiman warga dan mudahnya tersebar bibit penyakit seperti diare dan penyakit-penyakit lainnya.

Pada prinsipnya PKPT bertujuan untuk menata dan meningkatkan kehidupan desa pesisir yang berbasis masyarakat. Kegiatan ini bisa menghasilkan output secara fisik, yang memberikan manfaat riil bagi masyarakat, dan tujuan utamanya adalah :

1. Meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana
2. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup di kawasan pesisir

3. Memfasilitasi kegiatan pemnagunan pengembangan sarana dan prasarana sosial ekonomi di kawasan pesisir
4. Mengembangkan kelembagaan masyarakat secara partisipatif.

### **B. Rumusan Masalah**

Dari yang sudah dijelaskan pada latar belakang, maka dapat diketahui pokok permasalahannya yaitu :

Bagaimana Efektivitas Program Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh di Kabupaten Pekalongan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah. Mengetahui program Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh yang ada di Kabupaten Pekalongan sudah terlaksana sesuai sasaran/ efektif atau belum efektif.

## **D. Kajian Teori**

### **1. Administrasi Publik**

Menurut Pfiffner dan Presthus (dalam Kencana Syafiie, 2010:23) antara lain sebagai berikut :

1. Administrasi Publik meliputi implementasi kebijaksanaan pemerintah yang telah ditetapkan oleh badan-badan perwakilan politik.
2. Administrasi Publik dapat didefinisikan koordinasi usaha-usaha perorangan dan kelompok untuk melaksanakan kebijaksanaan pemerintah. Hal ini terutama meliputi pekerjaan sehari-hari pemerintah.
3. Secara global, administrasi publik adalah suatu proses yang bersangkutan dengan pelaksanaan kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah, pengarahan kecakapan, dan teknik-teknik yang tidak terhitung jumlahnya, memberikan arah dan maksud terhadap usaha sejumlah orang.

### **2. Kebijakan Publik**

Menurut Willy N. Dunn (dalam Syafiie, 2010:106) bahwa kebijakan publik adalah suatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling

berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut tugas pemerintahan, seperti pertahanan keamanan, energy, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, kriminalitas, perkotaan, dan lain-lain.

Menurut Lester dan Stewart (Winarno, 2013 : 32) studi kebijakan publik telah terangkum dalam lingkaran kebijakan publik atau tahap- tahap kebijakan publik. Dengan ini maka wilayah kajian kebijakan publik sangatlah luas dan tidak hanya terpaku pada lembaga-lembaga formal saja seperti ilmu politik tradisional. Tetapi bila merujuk pada tahap- tahap yang dikemukakan oleh Jones dan beberapa ahli lain, domain kebijakan publik meliputi : penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi dan penilaian kebijakan.

### **3. Efektivitas**

Menurut Saxena dalam Indrawijaya (2010:175) efektivitas merupakan suatu ukuran yang mengukur seberapa jauh tingkat target atau tujuan (kualitas, kuantitas, dan

waktu) yang telah tercapai. Semakin besar tingkat target yang dicapai, maka akan semakin besar pula tingkat efektivitasnya. Masalah penggunaan masukan tidak menjadi isu dalam konsep ini, pada dasarnya organisasi pemerintah lebih berorientasi pada pencapaian suatu efektivitas.

Makmur (2011:7-9) mengungkapkan indikator efektivitas dilihat dari beberapa segi kriteria efektivitas, sebagai berikut :

1. Ketepatan waktu Waktu adalah sesuatu yang dapat menentukan keberhasilan sesuatu kegiatan yang dilakukan dalam sebuah organisasi tapi juga dapat berakibat terhadap kegagalan suatu aktivitas organisasi. Penggunaan waktu yang tepat akan menciptakan efektivitas pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.
2. Ketepatan perhitungan biaya. Berkaitan dengan ketepatan dalam pemanfaatan biaya, dalam arti tidak mengalami kekurangan juga sebaliknya tidak mengalami kelebihan pembiayaan sampai suatu kegiatan dapat dilaksanakan

dan diselesaikan dengan baik. Ketepatan dalam menetapkan satuan – satuan biaya merupakan bagian daripada efektivitas.

3. Ketepatan dalam pengukuran, dengan ketepatan ukuran sebagaimana yang telah ditetapkan sebelumnya sebenarnya merupakan gambaran daripada efektivitas kegiatan yang menjadi tanggung jawab dalam sebuah organisasi.
4. Ketepatan dalam melakukan perintah. Keberhasilan aktivitas suatu organisasi sangat banyak dipengaruhi oleh kemampuan seorang pemimpin, salah satunya kemampuan memberikan perintah yang jelas dan mudah dipahami oleh bawahan. Jika perintah yang diberikan tidak dapat dimengerti dan dipahami maka akan mengalami kegagalan yang akan merugikan organisasi.
5. Ketepatan dalam menentukan tujuan. Ketepatan dalam menentukan tujuan merupakan aktivitas organisasi untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Tujuan yang ditetapkan secara tepat akan

sangat menunjang efektivitas pelaksanaan kegiatan terutama yang berorientasi kepada jangka panjang.

6. Ketepatan sasaran. Penentuan sasaran yang tepat baik yang ditetapkan secara individu maupun secara organisasi sangat menentukan keberhasilan aktivitas organisasi. Demikian pula sebaliknya, jika sasaran yang ditetapkan itu kurang tepat, maka akan menghambat pelaksanaan berbagai kegiatan itu sendiri.

Adapun kriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan yang efektif atau tidak, sebagaimana dikemukakan oleh Siagian (2008: 77), yaitu :

1. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksudkan supaya pegawai dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi dapat tercapai.
2. Kejelasan strategi pencapaian tujuan, telah diketahui bahwa strategi adalah “pada jalan” yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya dalam mencapai sasaran-sasaran yang ditentukan agar para

implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi.

3. Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan artinya kebijakan harus mampu menjembatani tujuan-tujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional.
4. Perencanaan yang matang, pada hakekatnya berarti memutuskan sekarang apa yang dikerjakan oleh organisasi dimasa depan.
5. Penyusunan program yang tepat suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat sebab apabila tidak, para pelaksana akan kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja.
6. Tersedianya sarana dan prasarana kerja, salah satu indikator efektivitas organisasi adalah kemampuan bekerja secara produktif, dengan sarana dan prasarana yang tersedia dan mungkin disediakan oleh organisasi.

#### **4. Fenomena Penelitian**

Fenomena yang akan diteliti dalam penelitian ini melihat bagaimana program Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh (PKPT) di Kabupaten Pekalongan, berjalan dengan baik atau sebaliknya. Hasil dari pencapaian tujuan dari diadakannya program Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh (PKPT) ini adalah :

1. Meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana
2. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup di kawasan pesisir
3. Memfasilitasi kegiatan pembangunan pengembangan sarana dan prasarana sosial ekonomi di kawasan pesisir
4. Mengembangkan kelembagaan masyarakat secara partisipatif.

#### **5. Metode Penelitian**

Pada penelitian ini, penulis memilih menggunakan metode penelitian kualitatif bersifat deskriptif, karena penulis ingin mengetahui bagaimana efektivitas program Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh (PKPT) di Kabupaten Pekalongan, di mana

yang menjadi tempat penelitian adalah desa Api-api Kecamatan Wonokerto. Di dalam penelitian ini, penulis menggunakan data sekunder dan primer sebagai sumber untuk mendapatkan informasi mengenai penelitian.

#### **6. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

##### **Efektivitas program PKPT**

##### **Pencapaian Tujuan**

##### **1. Meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana**

Di dalam hal kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana ini merupakan salah satu dari bentuk penanggulangan bencana, bahwa kegiatan kesiapsiagaan merupakan tanggungjawab Pemerintah, Pemerintah Daerah dan dilaksanakan bersama-sama masyarakat dan lembaga usaha. Mengingat masyarakat merupakan korban potensial di daerah beresiko bencana dan yang pertama-tama menghadapi bencana adalah masyarakat, maka pendekatan kesiapsiagaan gempa bumi dan tsunami yang dibangun adalah berbasis masyarakat. Agar pemerintah terutama tingkat

kabupaten dan kota, kelompok pedulai, dan masyarakat itu sendiri dapat melakukan upaya kesiapsiagaan terhadap bencana. Kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana dilaksanakan untuk memastikan terlaksananya tindakan yang cepat dan tepat pada saat terjadi bencana. Pada kenyataannya penyelenggaraan kesiapsiagaan tersebut berdasarkan sumber dan hasil pengamatan yang dilakukan oleh penulis, belum dilaksanakan, sehingga program Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh (PKPT) di Kabupaten Pekalongan khususnya desa Api-api dengan tujuan untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana dapat dikatakan belum efektif.

Di dalam program Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh (PKPT) perlu dilakukan penyuluhan, latihan dan simulasi kepada masyarakat oleh pemerintah, BPBD, LSM dan perangkat desa Api-api. Pemerintah dapat bekerjasama dengan pihak swasta untuk melindungi masyarakat agar siap dalam menghadapi bencana. Hal

ini berdasarkan hasil penelitian tingkat kesiapsiagaan masyarakat kurang siap dalam menghadapi bencana oleh karena itu program pemerintah daerah maupun pusat yang terkait dengan kebencanaan perlu dilakukan evaluasi. Melanjutkan program berkelanjutan untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat terhadap gempa bumi dan menitikberatkan pada pentingnya peran masyarakat sebagai subyek dalam kegiatan tersebut.

## **2. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup di kawasan pesisir**

Di dalam meningkatkan kualitas lingkungan hidup dengan membuat drainase memang sudah cukup bagus, namun kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya masih belum terlaksanakan, sehingga mengakibatkan drainase yang telah dibuat tersebut manfaatnya menjadi berkurang, dikarenakan sampah yang menyumbat saluran drainase tersebut. Melihat hal yang sedemikian tersebut dapat dikatakan bahwa partisipasi masyarakat pesisir desa Api-api dalam mendukung meningkatkan kualitas lingkungan

hidup mereka masih kurang. Hakikat manusia di muka bumi adalah sebagai khalifah, sehingga kita sebagai manusia seharusnya bijaksana dalam mengelola lingkungan dan memanfaatkan fasilitas yang ada. Akan tetapi kenyataannya manusia masih belum bisa memanfaatkan fasilitas yang telah bangun tersebut secara bijaksana. Menyikapi kerusakan lingkungan hidup tersebut, pemerintah sudah mengambil berbagai macam upaya atau solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Pembangunan berkelanjutan (sustainability development) merupakan salah satu alternatif untuk mengatasi permasalahan lingkungan. Pembangunan berkelanjutan adalah suatu proses pembangunan yang mengoptimalkan manfaat dari sumber daya manusia.

### **3. Memfasilitasi kegiatan pembangunan pengembangan sarana dan prasarana sosial ekonomi di kawasan pesisir**

Di dalam hal pembangunan pengembangan sarana sudah berjalan, yaitu dengan adanya bangunan talud sender dan

pembangunan jembatan penyebrangan sungai, namun pembangunan talud yang telah jadi dirasakan warga tidak dapat berfungsi dengan baik. Pada kenyataan yang terjadi di lapangan, mereka belum dapat dikatakan sejahtera. Hal ini disebabkan tambak yang menjadi mata pencaharian utama warga pesisir tergenang oleh air dan sekarang menjadi lautan, sehingga hal ini menyebabkan warga masyarakat kehilangan mata pencaharian mereka.

Program dengan memfasilitasi sarana dan prasarana ekonomi pun belum dapat dilaksanakan di desa Api-api. Padahal berdasarkan sumber yang peneliti dapat, mereka lebih membutuhkan sentuhan bantuan di bidang ekonomi. Hal ini juga disebabkan dengan adanya pemberhentian dari program Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh (PKPT) pada tahun 2017, yang seharusnya semua Kelompok Masyarakat Pesisir (KMP) yang telah dibentuk mendapatkan bantuan mereka menjadi tidak dapat melaksanakan kegiatan. Ini yang

menyebabkan bahwa program Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh (PKPT) ini belum dapat dikatakan sejahtera, karena bantuan yang diberikan belum menyeluruh. Berbeda halnya jika program ini masih berjalan, program-program yang akan dilaksanakan di tahun ke-3 (tiga) atau tahun 2017, semua Kelompok Masyarakat Pesisir (KMP) akan tersentuh bantuan program Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh (PKPT), sehingga program yang belum dikerjakan pada Kelompok Masyarakat Pesisir (KMP) sebelumnya dapat dikerjakan oleh kelompok yang lain.

#### **4. Mengembangkan kelembagaan masyarakat secara partisipatif**

Program Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh (PKPT) ini memang menjadikan masyarakat pesisir menjadi aktor utama dalam pelaksanaannya, mereka harus dapat berpartisipasi baik dalam pembangunan maupun pengawasan kegiatan. Proses pengawasan dalam program ini adalah mereka KMP ikut mengawasi dan mengamati dari pelaksanaan seluruh kegiatan

program untuk menjamin semua pekerjaan yang sedang dilakukan itu berjalan dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Dari hal ini mereka KMP sudah dapat berpartisipasi dalam melakukan pengawasan.

Adanya program Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh (PKPT) ini juga diharapkan agar masyarakat dapat berperan aktif dalam pelaksanaan, baik dalam kegiatan pembangunan maupun pengawasan pelaksanaan program Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh (PKPT). Pada kenyataannya peran aktif masyarakat tidak dapat diselenggarakan baik semua Kelompok Masyarakat Pesisir (KMP), Guyub Sentosa contohnya. Mereka beranggapan bahwa jika mereka ikut serta dalam kegiatan pembangunan berarti mereka harus mendapatkan upah atau imbalan berupa uang. Tanpa mereka sadari dengan adanya bantuan program Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh (PKPT) ini merkan telah mendapatkan timbal balik dari kegiatan tersebut. Berkurangnya bencana rob dan banjir contohnya,

mereka dapat sedikit terhidar dari bencana tersebut yang setiap tahunnya melanda permukiman mereka. Masih kurangnya partisipasi warga dalam program Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh (PKPT) ini dikarenakan, tidak tahunya mereka adanya kegiatan program Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh (PKPT) tersebut.

#### **5. Waktu**

Di dalam program Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh (PKPT) ini penulis dapat melihat sendiri berdasarkan penelitian apa yang telah direncanakan dengan apa yang terjadi pada kenyataannya. Pada kenyataan program Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh (PKPT) ini tidak dapat terlaksana berdasarkan waktu yang telah ditentukan. Program Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh (PKPT) di Kabupaten Pekalongan dapat dikatakan efektif apabila waktu yang direncanakan

pada awal perencanaan itu sesuai dengan kenyataannya sekarang atau tepat dengan waktu perencanaan. Pada nyatanya Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh (PKPT) ini baru berjalan 2 (dua) tahun dari rencana waktu pelaksanaan kegiatan yaitu tahun 2015-2017. Berdasarkan kejadian tersebut, menghambat kegiatan-kegiatan yang belum sempat terlaksana. Ketidaktepatan atau ketidaksesuaian waktu, pelaksanaan Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh (PKPT) di Kabupaten Pekalongan masih belum dapat dikatakan efektif. Pelaksanaan akan efektif apabila waktu yang direncanakan yaitu 2015-2017 itu tercapai dan terlaksana pada tahun ke-3 (tiga), lebih bagus lagi apabila pelaksanaan program ini dapat bersifat berkelanjutan, sehingga

masyarakat pesisir khususnya akan sejahtera dalam segala hal.

## **6. Sumberdaya**

### **a. Biaya**

Dapat diketahui oleh peneliti bahwa dalam hal biaya masih belum efektif. Di dalam penyaluran anggaran dana bantuan Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh (PKPT) ini melalui 2 (dua) tahap, tahap pertama pada tahun 2015 sebesar Rp 446.100.000,- untuk 3 (tiga) KMP, dan tahun 2016 sebesar Rp 878.000.000,- untuk 3 (tiga) desa. Di dalam penyaluran anggaran nyatanya dana yang dianggarkan kepada 3 (tiga) desa ini tidaklah sama antara KMP Cemara Laut 1, KMP Guyub Sentosa dan KMP Dedy Mulya. Dana yang diberikan pada KMP Cemara Laut 1 sebesar Rp 132.000.000,- itu untuk pembangunan talud sungai dan juga jembatan.

### **b. Tenaga kerja**

Dalam program Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh (PKPT) ini masyarakat pesisir merupakan aktor utama dalam pelaksanaan kegiatan, maka keterlibatan masyarakat sangat diperlukan. Program Pengembangan

Kawasan Pesisir Tangguh ini juga menjadikan masyarakat pesisir menjadi berdaya dan dapat secara aktif berpartisipasi dalam pelaksanaan program. Program Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh (PKPT) ini memang menjadikan masyarakat pesisir menjadi aktor utama dalam pelaksanaannya, mereka harus dapat berpartisipasi baik dalam pembangunan maupun pengawasan kegiatan. Proses pengawasan dalam program ini adalah mereka KMP ikut mengawasi dan mengamati dari pelaksanaan seluruh kegiatan program untuk menjamin semua pekerjaan yang sedang dilakukan itu berjalan dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Dari hal ini mereka KMP sudah dapat berpartisipasi dalam melakukan pengawasan.

## **PENUTUP**

### **1. KESIMPULAN**

Pelaksanaan Program Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh (PKPT) di Kabupaten yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat pesisir dalam kehidupan, belum efektif. Segi pencapain tujuan pun masih belum

efektif, karena tujuan yang telah ditetapkan pada awal perencanaan, dimana tujuan dari pelaksanaan dari program Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh (PKPT) ini untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana, meningkatkan kualitas lingkungan hidup di kawasan pesisir, memfasilitasi kegiatan pembangunan pengembangan sarana dan prasarana sosial ekonomi di kawasan pesisir, mengembangkan kelembagaan masyarakat secara partisipatif dengan melibatkan peran serta perempuan. Pada kenyataannya belum semua tujuan itu dapat berjalan dengan baik, sehingga dapat dikatakan bahwa Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh (PKPT) ini belum efektif. Hal ini dikarenakan belum semua masyarakat bahkan KMP turut antusias dalam pelaksanaan PKPT ini. Segi sumberdaya dalam hal ini belum efektif.

## **2. SARAN**

Sosialisasi seharusnya lebih ditingkatkan kembali, sosialisasi dapat membuat masyarakat ikut berperan. Pada hal ini Peran aktif

atau partisipasi masyarakat lebih ditingkatkan guna kepentingan bersama dan untuk mendorong keberlanjutan program Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh (PKPT). Di dalam Pemerintah perlu mengkaji mengenai prioritas keberlanjutan program Pengembangan Kawasan Pesisir Tagguh (PKPT), sehingga dapat dipastikan masyarakat pesisir khususnya dalam penelitian ini adalah masyarakat pesisir Kabupaten Pekalongna dapat dinyatakan tangguh.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Buku :

Anwas. (2013). *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*. Bandung: Alfabeta Wahab, Solichin. (2008). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Malang:

Kencana, Inu. (2010). *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta : Rineka Cipta

Makmur.(2011). *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*. Bandung : Refika Aditama

Pedoman Teknis Pengembangan Pesisir Tangguh (PKPT) 2015

Siagian, Sondang. (2013).

Sofyandi, Herman. (2008). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta:

Sugiyono.(2009).*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung :

Alfabeta.

Sugiyono.(2010). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif & RND*. Bandung :

Alfabeta

Sugiyono.(2013). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif Kualitatif & RND)*. Bandung

: Alfabeta